# PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
## (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor)

Skripsi

Diajukan oleh:

Nurhani Salamah
022116052

**FAKULTAS EKONOMI**
**UNIVERSITAS PAKUAN**
**BOGOR**

**2020**

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
**(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

| | |
|---|---|
| Dekan Fakultas Ekonomi | Ketua Program Studi |
| (Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.) | (Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.) |



Dipindai dengan CamScanner

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu/26 Desember 2020

Nurhani Salamah
022116052

Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CSCA., CA., CSEP., QIA)

| Ketua Komisi Pembimbing | Anggota Komisi Pembimbing |
|---|---|
| (Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE.) | (Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si.) |

**NOMOR : 73/KEP/REK/IX/2020**
**TENTANG : PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nurhani Salamah |
| NPM | : | 022116052 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bogor) |

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten dan Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Februari 2021

Nurhani Salamah

022116052

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020**
**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

# ABSTRAK

Nurhani Salamah. 022116052. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bogor). Pembimbing: Ernadhi Sudarmanto dan Dessy Herlisnawati. 2020.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan isntansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi intansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menjelaskan (1) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (2) Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (3) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

Penelitian ini dilakukan pada lingkup Intsansi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu 5 Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor yang terdiri dari 50 orang responden. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan SPPS versi 16 dengan menggunakan uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, hal ini disebabkan SKPD Kabupaten Bogor belum mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik. Akuntabilitas dari masing-masing SKPD masih rendah sehingga akan mempengaruhi kinerjanya. Pada pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan, Sehingga untuk meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan pengawasan karena dengan pengawasan yang optimal akan berdampak baik pada kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

**Kata Kunci:** Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah

# KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan sepenuh hati, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor)".

Dalam penyusunan proposal penelitian ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semuanya itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar menjadi lebih baik.

Penulisan proposal penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Orang tua penulis, Bapak Cecep Muhamad dan Ibu Iis Ismawati yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehinggan berjalan dengan lancar.
3. Fandi Hasan, Sahira Adelia, Muhammad Irsya, Sahila Arsy selaku adik penulis yang memberikan semangat dan hiburan kepada penulis.
4. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A,. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Dr. Chaidir, S.E., MM., dan Ibu Dr. Ir. Hj. Yuary Farradia, Msc. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si, CMA., CAPM. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

9. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi penelitian ini.
10. Ibu Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
12. Teman-temanku: Dilla, Empus, Eyis, Sartika, Sabrina, Novi, Lina, Anti, Nisa, Vien, Riki, Deni, Eka dan Anita yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi penelitian ini.
13. Seluruh teman-teman kelas A dan B Akuntansi angkatan 2016 yang memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh penulis, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis.

Semoga semua doa, bantuan, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga skripsi penelitian ini memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

# DAFTAR ISI

**JUDUL** ..... i
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**.....ii
**LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN**.....iii
**LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**.....iv
**LEMBAR HAK CIPTA** ..... v
**ABSTRAK**.....vi
**KATA PENGANTAR**..... vii
**DAFTAR ISI**..... ix
**DAFTAR TABEL** ..... xii
**DAFTAR GAMBAR**..... xiii
**DAFTAR LAMPIRAN**..... xiv
**BAB I PENDAHULUAN**
1.1 Latar Belakang Penelitian ..... 1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah..... 6
1.2.1 Identifikasi Masalah..... 6
1.2.2 Perumusan masalah..... 6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 7
1.3.1 Maksud Penelitan ..... 7
1.3.2 Tujuan Penelitian ..... 7
1.4 Kegunaan Penelitian..... 7
1.4.1. Kegunaan Praktis.....7
1.4.2. Kegunaan Akademis.....8
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
2.1 Akuntansi Sektor Publik..... 9
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik ..... 9
2.1.2 Karakterisitik Akuntansi Sektor Publik ..... 9
2.1.3 Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik..... 10
2.1.4 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik ..... 11
2.1.5 Indikator Akuntansi sektor Publik ..... 13
2.2 Pengawasan Internal..... 13
2.2.1 Pengertian Pengawasan Internal ..... 13
2.2.2 Tahap-tahap Proses Pengawasan Internal ..... 14
2.2.3 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008) ..... 15
2.2.4 Indikator Pengawasan Internal..... 16

2.3 Kinerja Instansi Pemerintah ..... 18
2.3.1 Pengertian Kinerja ..... 18
2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja ..... 19
2.3.3 Manfaat Kinerja Pemerintah ..... 19
2.3.4 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah ..... 19
2.3.5 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja ..... 20
2.3.6 Indikator Kineja Instansi Pemerintah ..... 20
2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran ..... 21
2.4.1 Penelitian Sebelumnya ..... 21
2.4.2 Kerangka Pemikiran ..... 26
2.4.2.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah ..... 26
2.4.2.2 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah ..... 26
2.4.2.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah ..... 27
2.5 Hipotesis Penelitian ..... 28
**BAB III METODE PENELITIAN**
3.1 Jenis Penelitian ..... 29
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian ..... 29
3.2.1 Objek Penelitian ..... 29
3.2.2 Unit Analisis Penelitian ..... 29
3.2.3 Lokasi Penelitian ..... 30
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian ..... 30
3.4 Operasionalisasi Variabel ..... 30
3.5 Metode Penarikan Sampel ..... 31
3.6 Metode Pengumpulan Data ..... 32
3.7 Metode Pengolahan /Analisis Data ..... 32
3.7.1 Uji Kualitas Data ..... 32
3.7.1.1 Uji Validitas ..... 33
3.7.1.2 Uji Reliabilitas ..... 33
3.7.2 Uji Asumsi Klasik ..... 33
3.7.2.1 Uji Normalitas ..... 33
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas ..... 33
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas ..... 33
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda ..... 34
3.7.3.1 Koefisien Determinasi ..... 34
3.7.4 Uji Hipotesis ..... 34
3.7.4.1 Uji T ..... 34

3.7.4.2 Uji F.....35
**BAB IV HASIL PENELITIAN**
4.1 Hasil Pengumpulan Data ..... 36
4.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden..... 37
4.1.2. Deskripsi Data Variabel ..... 40
4.1.3 Sejarah Kabupaten Bogor..... 43
4.1.4 Gambaran Kabupaten Bogor ..... 44
4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Bogor..... 46
4.2 Analisis Data ..... 47
4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data ..... 47
4.2.1.1 Hasil Uji Validitas.....47
4.2.1.2 Hasil Uji Reliabilitas.....49
4.2.2 Uji Asumsi Klasik..... 49
4.2.1.2 Hasil Uji Normalitas.....49
4.2.2.2 Hasil Uji Multikolineritas.....50
4.2.2.3 Hasil Uji Heterokedasitas.....50
4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ..... 51
4.2.3.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2).....52
4.2.4 Pengujian Hipotesis..... 52
4.2.4.1 Pengujian Hipotesis Parsial (uji t).....52
4.2.4.2 Pengujian Hipotesis Parsial (uji f).....53
4.3 Pembahasan ..... 53
4.3.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor..... 54
4.3.2 Pengawasan Internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor ..... 54
**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**
5.1 Simpulan..... 56
5.2 Saran..... 56
**DAFTAR PUSTAKA**..... 58
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**.....65
**LAMPIRAN**.....66

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kumpulan Penelitian Terdahulu ..... 21
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu ..... 25
Tabel 3.1 Jenis, Metode dan Teknik Penelitian ..... 29
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel ..... 30
Tabel 4.1 Rincian Tingkat Pengembalian Kuesioner ..... 36
Tabel 4.2 Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kusioner Responden ..... 36
Tabel 4.3 Deskripsi Jenis Kelamin Responden ..... 37
Tabel 4.4 Deskripsi Jabatan Responden ..... 37
Tabel 4.5 Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 38
Tabel 4.6 Deskripsi Lama Bekerja Reponden ..... 39
Tabel 4.7 Deskripsi Latar Belakang Pendidikan Responden ..... 39
Tabel 4.8 Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) ..... 40
Tabel 4.9 Pengawasan Internal (X2) ..... 41
Tabel 4.10 Kinerja Instansi Pemerintah (Y) ..... 42
Tabel 4.11 Nama Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ..... 45
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) ..... 47
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Internal (X2) ..... 47
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) ..... 48
Tabel 4.15 Hasil Uji realibilitas ..... 49
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov Test* ..... 49
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolineritas ..... 50
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ..... 51
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) ..... 52
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Parsial (uji t) ..... 52
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Parsial (uji f) ..... 53

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Sektor Publik ..... 11
Gambar 2.2 Tahapan Proses Pengawasan Internal ..... 14
Gambar 2.3 Konstelasi Penelitian ..... 27

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Perhitungan Data Kuesioner ..... 58
Lampiran 2 : Format Kuesioner ..... 63

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu negara merupakan suatu faktor yang penting dalam kemajuan suatu negara. Dengan diterapkannya suatu pemerintahan yang baik maka potensi-potensi yang ada di negara tersebut dapat dikembangkan secara maksimal dan efisien demi memajukan negara tersebut. Indonesia sebagai suatu negara berkembang dan memiliki banyak potensi saat ini selalu melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan demi memajukan negara dan juga menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara intensif melalui instansi pemerintah yang berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang juga memegang kendali atas berlangsungnya *governance* (Dharmawan dan Supriatna 2016). Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman atas tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah (Nugroho, 2016). Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi daerah untuk mengelola keuangan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2014).

Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku (Pamungkas, 2012). Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut.

Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan pernyataan menolak memberi opini (Putri, 2015). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan pemerintah daerah, ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan.

Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan laporan keuangan ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penetapan ukuran-ukuran yang dapat digunakan adalah adanya nilai ekonomis dan efisiensi dari laporan keuangan serta efektivitas penggunaan sumberdaya (*value for money*) dan terlihat secara jelas *outcome* yang dihasilkan.

Di sisi lain, untuk mewujudkan pemda yang sesuai *value for money* (*economy, efficiency, effective*), perlu peningkatan peran fungsi aparat pemeriksa fungsional pemerintah lingkungan pemda. Fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pengawasan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai merupakan perwujudan dari implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing intansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik lagi. Pemerintahan yang bersih dapat di impretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah (Sartika, 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada penyelenggaraan SAKIP meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja. Penanggungjawab

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing, selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. LAKIP adalah produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Alamanda (2013) menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu melalui pengawasan internal pada organisasi pemerintahan guna membenahi dan mengurangi kasus tentang buruknya kinerja pemerintah daerah. Penelitian Alamanda juga didukung oleh Sukmana dan Anggarsari (2009) Penelitian ini menyatakan dalam kaitannya dengan lingkup kerja pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya, sehingga kinerja pemerintah daerah yang baik dapat dilihat juga dari penilaian pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa: Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengawasan internal dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintah. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan memberi dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai. Pengawasan internal dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, mencegah kehilangan sumber daya, dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan (Yusmarizar, 2014).

Kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis karena saat ini perbaikan kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan *compability* informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting.

Terdapat temuan tindak pidana kasus korupsi oleh KPK terkait pemotongan uang anggaran dinas dari sejumlah SKPD mencapai Rp. 8,93 miliar, gratifikasi berupa

tanah seluas 20 hektar di Jonggol Kabupaten Bogor dan mobil toyota velflre senilai Rp. 825 juta yang dilakukan oleh Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin dan dugaan melibatkan beberapa Kepala Dinas di Pemerintah Kab. Bogor serta menghadirkan 26 SKPD dalam persidangan.

Sumber: (https://www.radarbogor.id/2019/07/05/kasus-penyunatan-anggaran-dan gratifikasi-ry-kpk-telusuri-dugaan-keterlibatan-kepala-dinas/)

Di dalam fenomena tersebut, terdapat kesenjangan di mana yang seharusnya penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah dapat menujukkan informasi berupa laporan keuangan yang menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dan pengawasan internal dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, mencegah kehilangan sumber daya, dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Tetapi masih terdapat kinerja instansi pemerintah yang belum dikelola dengan baik terbukti dengan adanya fenomena pemotongan uang anggaran dinas dari sejumlah SKPD yang dilakukan oleh Mantan Bupati Rachmat Yasin. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SKPD Dinas Kabupaten Bogor. Adapun SKPD Dinas Kabupaten Bogor yang diteliti oleh peneliti yaitu :

| No. | Organisasi |
|---|---|
| 1 | Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor |
| 3 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor |
| 4 | Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor |
| 5 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor |

Dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor berjumlah 33 tetapi yang diteliti oleh peneliti hanya 5 SKPD Dinas dikarenakan sudah mewakili dari OPD tersebut.

Oleh karena itu, Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keungan daerah, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut. Pengawasan internal berarti pendayagunaan aparatur negara dalam membarantas adanya unsur kecurangan atau penyelewengan

dengan di adakannya pengawasan internal dalam rangka mengawasi kinerja pengelolaan pemerintah daerah sehingga tercipta *good governance*. Karena Hakikat pengawasan itu sendiri adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 41 (1) yaitu Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama kepala daerah. Demikian pula dalam keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Pasal (6), dinyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan pengguna sebagai bahan pengambil keputusan (Ilmi, 2014).

Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal memiliki pengaruh cukup besar terhadap suatu kinerja instansi pemerintah karena kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang startegis dimana perbaikan kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Pemerintah yang bersih dapat di impretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah dimana akuntabilitas kinerja intansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah.

*Value for Money* dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga penting untuk diimplementasikan. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik, tentu tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri maupun lembaga pengawas khusus lainnya yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran (Purnomo dan Putri 2018). Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara internal yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini dilakasanakan dengan tujuan untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, kendala laporan keuangan di sektor pemerintah, serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penelitian mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda. Sari (2015), Marlena dan Subaeti (2018) dan Sartika (2019) menyimpulkan bahwa Penerapan akuntansi sektor publik

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian Yusmarizar (2014), Hadi (2016) dan Sholikah, dkk (2016) menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Anisatul, dkk (2017) menyimpulkan bahwa pengawasan internal berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bogor)".

## 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah belum dikelola dengan baik. Kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis karena saat ini perbaikan kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan *compability* informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting. Terdapat temuan tindak pidana kasus korupsi oleh KPK terkait pemotongan uang anggaran dinas dari sejumlah SKPD mencapai Rp. 8,93 miliar, gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol Kabupaten Bogor dan mobil toyota velflre senilai Rp. 825 juta yang dilakukan oleh Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin dan dugaan melibatkan beberapa Kepala Dinas di Pemerintah Kab. Bogor serta mengahdirkan 26 SKPD dalam persidangan. Sehingga Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik sangat diperlukan agar untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan pengawasan internal untuk kinerja instansi pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksaan tugas-tugas organisasi.

### 1.2.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat perumusan masalahnya sebagai berilut :

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Sektor Publik Pada Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor?

2. Bagaimana Pengawasan Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitan

Adapun maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data, dan memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah juga dapat mengetahui identifikasi penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal, bagaimana penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal dapat terjadi pada kinerja instansi pemerintah, mengetahui dampak apa yang terjadi apabila suatu instansi pemerintah mengalami fenomena yang tidak sesuai dengan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan memberikan saran kepada instansi pemerintah jika terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksaan tugas-tugas organisasi, memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan bahwa adanya pengaruh akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Serta untuk menambah pengetahuan penulis dalam upaya pengembangan ilmu yang diterima selama perkuliahan. Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir (Skripsi Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor).

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menjelaskan penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang, tentang hal-hal yang terkait dengan kekurangan dan kelebihan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan acuan bagi studi ilmiah tentang penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan individu yang berasal dari luar perkuliahan dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang didapat dari dunia perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melalukan penelitian sejenis.

# BAB II

# TINAJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Akuntansi Sektor Publik

### 2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2014) Akuntansi Sektor Publik adalah Mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Wiratna (2015) mengatakan Akuntansi Sektor Publik adalah Akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan. Akuntansi sektor publik termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga *nonprofit* atau *institusional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non profit lainnya, seperti mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Menurut Halim dan Kusufi (2018) mengatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah Suatu proses pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaski ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sedangkan Menurut Biduri (2018) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah Suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

### 2.1.2 Karakterisitik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi (Sartika, 2019).

Komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut (Biduri, 2018) antara lain :

1. Faktor Ekonomi antara lain :
    1. Pertumbuhan Ekonomi
    2. Tingkat Inflasi
    3. Tenaga Kerja
    4. Nilai Tukar Mata Uang
    5. Infrastruktur
    6. Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita (GNP/GDP)
2. Faktor Politik meliputi anatara lain :
    a. Hubungan Negara dan Masyarakat
    b. Legitimasi Pemerintah
    c. Tipe Rezim yang berkuasa
    d. Ideologi Negara
    e. Elit Politik dan Massa
    f. Jaringan Internasional
    g. Kelembagaan
3. Faktor Kultural meliputi antara lain :
    a. Keragaman Suku, Ras, Agama, Bahasa Dan Budaya
    b. Sistem Nilai di Masyarakat
    c. Historis
    d. Sosiologi Masyarakat
    e. Karakteristik Masyarakat
    f. Tingkat Pendidikan
4. Faktor Demografi meliputi antara lain :
    a. Pertumbuhan Penduduk
    b. Struktur Usia Penduduk
    c. Migrasi
    d. Tingkat Kesehatan

### 2.1.3 Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Menurut Biduri (2018) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis akuntansi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebgai berikut:

1. Instansi Pemerintah

Intansi Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk Intansi Pemerintah. Contohnya meliputi :

a. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. Lembaga dan Badan Negara seperti: KPU, KPK, dan lain-lain.

b. Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. contohnya :

a. Perguruan Tinggi BHMN
b. Rumah Sakit Milik Pemerintah seperti RSCM, RS daerah
c. Yayasan-Yayasan Milik Pemerintah

Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi Nirlaba Milik Swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimilik dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya :

a. Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dan lain-lain
b. Sekolah dan Universitas Swasta
c. Rumah Sakit Milik Swasta

### 2.1.4 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2014) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik dapat digambarkan dalam rangkaian siklus pada gambar berikut :

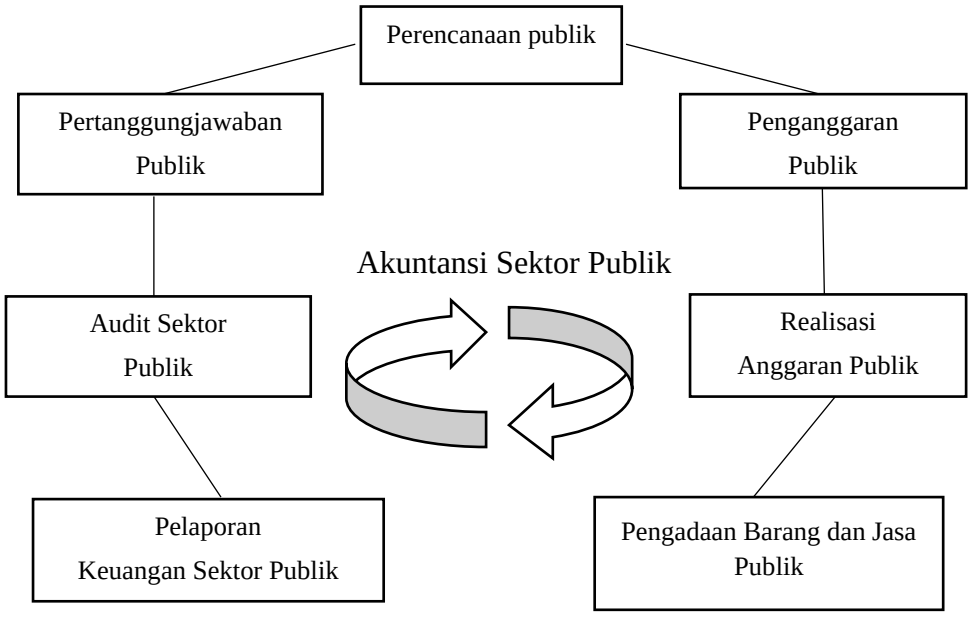


Gambar 2.1
Siklus Akuntansi Sektor Publik

(Bastian, 2014).

Gambar siklus akuntansi sektor publik diatas, terlihat bahwa akuntansi sektor publik memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

1. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1.

2. Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perkonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegera.

3. Realisasi Anggaran Publik

Realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri atas kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Siklus tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 7 bahwa Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi dan komponen laporannya meliputi: Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas yang dilengkapi catatan atas laporan keuanga, ataupun laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan dan *prospektus*.

6. Audit sektor Publik

Audit berhubungan erat dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh berbagai organisasi sektor publik dan pemerintahan. Pihak-pihk tertentu, sebagai contoh auditor dan pengawas, wajib memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pemeriksaan yang memang terlebih dahulu diprioritaskan, apalagi pada pemahaman tentang sistem akuntanasi yang dipakai oleh organisasi sektor publik. Agar pemeriksaan berjalan lebih efisien, efektif, dan ekonomis, organisasi publik juga harus

memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait audit yang akan dilakukan oleh auditor.

7. Pertanggungjawaban Sektor Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

### 2.1.5 Indikator Akuntansi sektor Publik

Menurut Bastian (2014) siklus akuntansi sektor publik antara lain :

1. Transaksi

Persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaki antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.

2. Analisis Bukti Transaksi

Setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3. Pencatatan Data Transaksi

Dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan tranasaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4. Pengikhtisaran

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.

5. Pelaporan

Selama periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebeneran dan reliabilitasnya.

## 2.2 Pengawasan Internal

### 2.2.1 Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan (Yahya, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa: Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Menurut BPK dalam Peraturan BPK Tahun 2007 Nomor 1 mendefinisikan Satuan Pengawasan Internal merupakan Unit Organisasi pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasam dalam lingkup kewenangannya.

Menurut Simbolon (2013) Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol.

Menurut Marota dan Ilmiyono (2020), warga masyarakat desa perlu menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa agar dapat terjadi perbaikan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten. Hal ini juga berfungsi untuk memantau pencapaian pendapatan asli desa tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Internal adalah kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### 2.2.2 Tahap-tahap Proses Pengawasan Internal

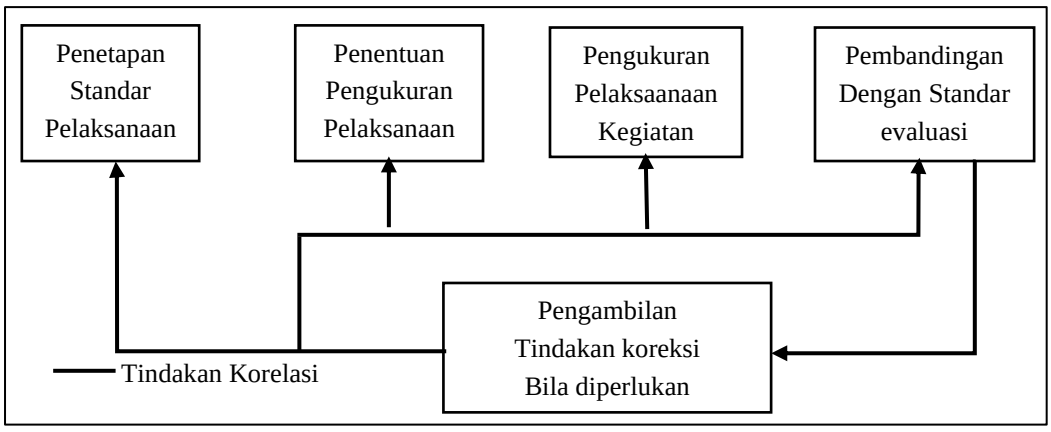


Gambar 2.0.2

Tahapan Proses Pengawasan Internal
(Handoko, 2013).

Menurut Handoko (2013) Tahapan Proses Pengawasan Internal meliputi:

1. Tahap 1: Penetapan Standar

   Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2. Tahap 2: Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

   Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Tahap 3: Pengukuran pelaksanaan kegiatan

   Setelah frekuensi pengukuran dan sistem *monitoring* ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus.

4. Tahap 4: Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
   Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

5. Tahap 5: Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

   Bila hasil analisa menujukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

### 2.2.3 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008)

1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas :
   a. BPKP
   b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan Pengawasan Internal
   c. Inspektorat Provinsi
   d. Inspektorat Kabupaten/Kota
2. BPKP melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi :
   a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral
   b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

3. Dalam rangka pelaksaan pengawasan internal untuk kegitan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya.

4. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementrian Negara/Lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

6. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota.

### 2.2.4 Indikator Pengawasan Internal

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (2013) dalam Internal *Control-Integrated Framework* (ICF) adalah :

1. Lingkungan Pengendalian (*Contorl Environment*)

Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian terdiri dari:

1. Integritas dan nilai etika organisasi;
2. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya;
3. Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab;
4. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; dan
5. Ketegasan mengenai tolak ukur kinerja, insetif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Penilaian Risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh

tujuan dari entitas di anggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetepkan. Oleh karena itu, penilaian risiko harus dikelola oleh organisasi.

Ada 4 (empat) prinsip yang mendukung penialain risiko dalam organisasi yaitu:

1. Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penialain risiko yang berkaitan dengan tujuan.
2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menetukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Organisasi memepertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas Pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

ada 3 (tiga) prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian dalam organisasi yaitu:

1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima.
2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
3. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

ada 3 (tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu:

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas Pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan pertimbangan manajemen lainnya.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian intern telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik lagi.

## 2.3 Kinerja Instansi Pemerintah

### 2.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara (2015) istilah kinerja berasal dari *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2015) mendefinisikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masingmasing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

### 2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut (Mangkunegara dalam Mulyadi 2015) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain :

a. Faktor kemampuan (*ability*)

Secara psikologis, kemmapuan (*ability*) terdiri dari kemamuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge+skill*), artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam menegrjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kerja maksimal.

b. Faktor Motivasi

Motivasi diartikan dalam suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karywan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap posotif (pro) terhadap siatuasi kerjanya akan menujukkan motivasi kerja tinggi sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situai kerjanya akan menujukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimakusd mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijkaan pemimin, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

### 2.3.3 Manfaat Kinerja Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018) manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kreatif untuk memperbaiki kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah di sepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secra objektif.

### 2.3.4 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Biduri (2018) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sitem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem

pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment systems.*

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maskud sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### 2.3.5 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018) Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian startegi.
c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

### 2.3.6 Indikator Kineja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018) *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi tekait dengan sejauh mana ognisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi: pencapai *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

## 2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang menyangkut tentang penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal dan pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah antara lain :

Tabel 2.1
Kumpulan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Penulis | Judul | Variabel | Indikator | Hasil | Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sartika | Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim | - Akuntansi Sektor Publik<br>- Pengawasan Internal<br>- Kinerja Instansi Pemerintah | - Analisis bukti transaksi<br>- Pencatatan data transaksi<br>-Pengikhtisaran<br>- Pelaporan<br>- Organisasi<br>- Kebijakan<br>- Prosedur<br>- Penganggaran<br>- Ekonomis<br>- Efisiensi<br>- Efektivitas | Hasil penelitian tersebut, menujukan bahwa Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Tidak terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah | 2019 Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | daerah Kabupaten Muara Enim. | |
| 2. | Putri Wulan Sari | Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah | - Penerapan Akuntansi Sektor Publik<br>- Pengawasan Internal<br>- Kinerja Instansi Pemerintah | - Analisis bukti transaksi<br>- Pencatatan data transaksi<br>- Pengikhtisaran<br>- Pelaporan<br>- Organisasi<br>- Kebijakan<br>- Prosedur<br>- Penganggaran<br>- Ekonomis<br>- Efisiensi<br>- Efektivitas | Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh terhadap Kinerja instansi Pemerintah. Pengawasan internal memberikan pengaruh terhadap Kinerja Instansi pemerintah. | 2015 Repository.uniko.ac.Id |
| 3. | Risdhayanti Nur Sholikah, Dewi Saptantinah Puji Astuti, Muhammad Rofiq Sunarto | Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | - Pengawasan Internal<br>- Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan | - Lingkungan pengendalian<br>- Penaksiran risiko<br>- Aktivitas pengendalian<br>- Informasi dan Komunikasi<br>- Pemantauan<br>- Prosedur akuntansi penerimaan kas<br>- Prosedur akuntansi pengeluaran kas<br>- Prosedur akuntansi aset tetap barang milik daerah<br>- Prosedur akuntansi selain kas<br>- Penyajian | Adanya pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah | Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 12, Edisi Khusus April 2016: 168-175 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | laporan keuangan | Kabupaten Boyolali | |
| | | | - Pengelolaan Keuangan Daerah | - Perencanaan<br>- Pelaksanaan<br>- Penatausahaan<br>- Pertanggungjawaban<br>- Pemeriksaan | | |
| | | | - Kualitas Laporan Keuangan | - Mempunyai nilai relevan<br>- Mempunyai nilai keterandalan<br>- Dapat Diperbanding Kan | | |
| 4. | Muhammad Nurul Hidayat | Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung | - Pengawasan Internal<br>- Kualitas Pelayanan | - Bukti langsung<br>- Keandalan<br>- Daya tanggap<br>- Jaminan<br>- Empati<br>-Kepemimpinan<br>-Pendidikan<br>-Perencanaan<br>-Review<br>-Komunikasi<br>-Penghargaan dan Pengakuan | Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas pelayanan dan juga terdapat pengaruh yang cukup kuat. Dengan demikian, hipotesis konseptual mengenai pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas pelayan teruji. | 2016 Skripsi Universitas Pasundan Bandung |
| 5. | Fauzy Ardy Nugroho | Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem | - Pengawasan | - Mengkaji sistem akuntansi dan pengendalian intern | Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengawasan, | 2013 Naskah Publikasi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Akuntansi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah | | - pengujian atas pengelolaan informal keuangan dan operasi pemerintah<br>- pengujian terhadap instrumen untuk menjaga harta, prosedur pemeriksaan yang tepat, standar operasional dan identfikasi keadaan yang tidak efisen<br>- pengujian terhadap pengendalian non finansial organisasi | pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. | Universitas Muhamdiyah surakarta |
| | | | - Pemahaman sistem akuntansi keuangan<br><br>- Pengelolaan keuangan<br><br>- Kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah | - kemudahan<br>- kemanfaatan<br><br>- Planinng<br>- Budget setting<br>- activity of budget implemantion<br>- Budget monitoring<br><br>- Pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program<br>- ketepatan dan kesesuaian hasil<br>- tingkat pencapaian program<br>- Dampak hasil | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kegiatan terhadap kegiatan masyarakat<br>- Kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran | | |
| 6. | Wawan Ridwan | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | - Penerapan anggaran berbasis kinerja<br>- Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | - Perencanaan anggaran<br>- Pelakasanaan anggaran<br>- Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran<br>- Evaluasi kinerja<br>- Pencapaian kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kab. Bogor | Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. | 2016 Skripsi Universitas pakuan Bogor |

Tabel 2.2
Matriks Penelitian Terdahulu

| Variabel Independen | Dependen | |
|---|---|---|
| | Kinerja Instansi Pemerintah | |
| | Berpengaruh | Tidak Berpengaruh |
| Penerapan Akuntansi Sektor Publik | Putri Wulan Sari (2015), Vany Marlena Dan Subaeti (2018), Sartika (2019) | - |
| Pengawasan Internal | Yusmalizar (2014), Muhammad Nurul Hadi (2016), Risdhayanti Nur Sholikah, Dewi Suptantinah Puji Astuti Dan Muhammad Rofiq Sunarko (2016), Muhammad Nurul Hidayat (2016) | Anisatul, Dewi Saptantinah Puji Astuti, Fadjar Harimurti (2017) |

(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019)

### 2.4.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut uraian mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini :

#### 2.4.2.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntansi sektor publik memiliki perananan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunanan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijaka-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto, dkk., 2017).

Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya dari Pamungkas (2012) bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh secara parsial mauun simultan terhadap kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik dengan kinerja instansi pemerintah.

#### 2.4.2.2 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Fungsi pengawasan internal merupakan suatu fungsi pengawasan yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Jadi, Pengawasan Internal merupakan suatu tindakan yang menjadi alat dalam pencapaian kinerja, apabila pengawasan internal telah tercapai sesuai yang diharapkan maka mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah yang diharapkan (Yusmarizar, 2014).

Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya dari Sukmana (2009) bahwa pengawasan internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Pengawasan internal dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan, dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. pengawasan internal dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan memberi dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengawasan internal dengan kinerja instansi pemerintah.

### 2.4.2.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instasni Pemerintah

Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta peratnggungjawaban publik (Bastian, 2014).

Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya dari Sari (2015) bahwa hasil dari penelitian ini menujukkan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja instasni pemerintah.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengawasan internal dengan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis menyimpulkan bahwa secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

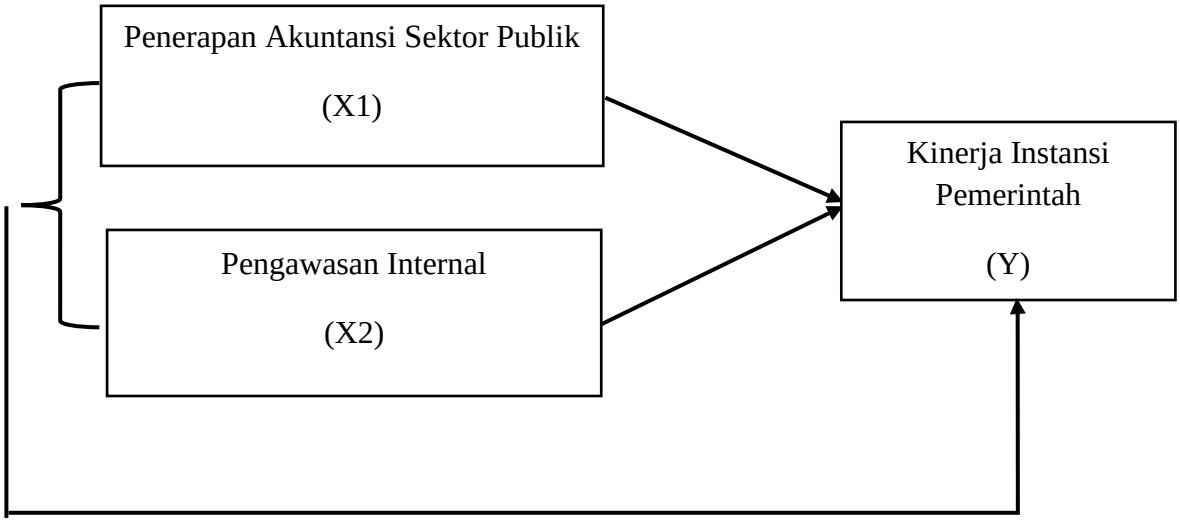


Gambar 2.3
Konstelasi Penelitian

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau asumsi sementara atas suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan kebenaran secara empiris, sehingga hipotesis penelitian merupakan dugaan atau asumsi sementara atas suatu hal, dalam hal ini objek yang di teliti penulis untuk diuji kbebnarannya. Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka hipotesis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

H2 : Terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

H3 : Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Verifikatif dengan metode penelitian *Explanatory Survey*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antar dua variabel Tu lebih dan merupakan hubungan sebab akibat.

Penelitian Verifikatif dengan metode penelitian *Explanatory Survey* menggunakan teknik penelitian statistik kualitatif yang dilakukan menggunakan kusioner sebagai alat penelitian dan statistik kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Untuk lebih jelasnya akan dituangkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

| Jenis/Bentuk Penelitian | Metode Penelitian | Teknik Penelitian |
|---|---|---|
| Verifikatif | *Explanatory Survey* | Statistik Kualitatif dan Kuantitatif |

## 3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

### 3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik yang diukur menggunakan Analisis bukti transaksi, Pencatatan data transaksi, Pengikhtisaran, Pelaporan dan Pengawasan Internal diukur menggunakan Organisasi, Kebijakan, Prosedur, Penganggaran serta Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen diukur dengan *Value For Money*.

### 3.2.2 Unit Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini unit analisis yang diteliti yaitu *Organization* atau Organisasi. Unit analisis berupa suatu organisasi, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (*respons*) suatu organisasi tertentu, dalam penelitian ini unit analisis penelitian yang dilakukan pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Bogor.

### 3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Bogor.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif dan kuantitatif yang merupakan data primer karena data tersebut diperoleh melalui menyebarkan angket yang memuat kusioner. Indikator-indikator variabel dijabarkan oleh penulis menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga diperoleh data kualitatif. Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisitik statistik yang relevan untuk menguji hipotesis.

Sumber data penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalu media perantara) yang diperoleh langsung dari pegawai Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Bogor.

## 3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen/Variabel Tidak Terikat/Variabel Bebas

Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen dan sebagai variabel yang mendahului. Adapaun variabel independen dalam penenlitian ini adalah Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal.

2. Variabel dependen/variabel terikat/variabel tidak bebas

Variabel Dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel lain (variabel independen). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

| Varibel | Indikator | Ukuran | Skala |
|---|---|---|---|
| Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) | 1. Analisis bukti transaksi | - Bukti transaksi dianalisis | Ordinal |
| | 2. Pencatatan data transaksi | - Pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3. Pengikhtisaran<br><br>4. Pelaporan | - memposting ke dalam buku besar<br><br>- Menyusun laporan keuangan untuk dianalisis duji kebenarannya dan reliabilitasnya | |
| Pengawasan Internal (X2) | 1. Organisasi<br><br>2. Kebijakan<br><br>3. Prosedur<br><br>4. Penganggaran | - Visi dan Misi di Instansi Pemerintah<br><br>- Kebijakan yang berlaku di Instansi Pemerintah<br><br>- Sarana yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Instansi Pemerintah<br><br>- Pertanggungjawaban mengenai anggaran di Instansi Pemerintah | Ordinal |
| Kinerja Instansi Pemerintah (Y) | 1. Ekonomi<br><br>2. Efisiensi<br><br>3. Efektivitas | - Cermat dalam penggunaan dan alokasi sumberdaya<br><br>- Penggunaan sumber daya<br><br>- Pencapaian dan tujuan sasaran | Ordinal |

## 3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan metode *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Populasi Penelitian adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Bogor yang berjumlah 33. Teknik *non prabibility sampling* yang dipilih adalah purposive sampling. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini diantaranya adalah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, berkompeten dalam administrasi keuangan, serta mampu menyusun akuntansi sektor publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor pada 5 SKPD Dinas. Jelasnya sampel dalam penelitian ini dapat diliht pada tabel 3.3 berikut :

| No. | Organisasi |
|---|---|
| 1 | Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor |
| 3 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor |
| 4 | Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor |
| 5 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor |

## 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa jenis metode pengumpulan data dan informasi, yaitu dengan cara penelitian data primer yang diperoleh langsung dari pegawai pada Organisai Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode survei melalui kuisioner dengan menggunakan Skala *Likert* dengan pemberian skor sebagai berikut :

1. SS : Sangat Setuju Diberi skor 5
2. S : Setuju Diberi skor 4
3. N : Netral Diberi skor 3
4. TS : Tidak Setuju Diberi skor 2
5. STS : Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1

## 3.7 Metode Pengolahan /Analisis Data

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian.

Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPPS Versi 16). Maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian, dilakukan dengan langka-langkah sebagai berikut :

### 3.7.1 Uji Kualitas Data

Agar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka instrumen tersebut dapat diujikan dalam bentuk uji validitas dan uji realibitas.

### 3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Produk Moment Pearson. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05. Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

### 3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016) uji reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kusioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dalam penelitian ini dalam menguji reliabilitas masing-masing instrumen penulis menggunakan uji staistik *Cronbach Alpha* (α). Perhitungan reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* (α) ini dilakukan dengan bantuan komputer IBM SPSS 16. Instrumen dikatakan relibel jika dinilai *Cronbach Alpha* nya > 0,70.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linear berganda dalam penggunaannya harus memenuhi uji asumsi klasik yang ditetapkan. Dalam uji asumsi klasik terdapat 4 analisis, diantaranya adalah :

### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Menggunakan bantuan aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSSS 16, hasil analisis akan memberikan gambaran dalam bentuk tabel. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikan $\alpha$ = 0,05.

### 3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dengan IBM SPPS 16 dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai Tolerancen dan VIF (*variance inflation factor*). Nilai Cuttof yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) Uji heteroskedestisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varaians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Plot.

### 3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui dan memprediksi apakah variabel (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan seberapa besar pengaruhnya kedua variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) pada penelitian ini.

$Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4 + \beta5X5 + e$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

a = Konstanta (nilai Y apabila X1 dan X2 = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = Variabel independen

#### 3.7.3.1 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016) koefsisien determinasi ($R^2$) bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai $R^2$ yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Semakin tinggi $R^2$, semakin penting suatu variabel karena dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, maka digunakan koefisien determinasi untuk mengukur besar sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi terkoreksi atau model regresi, maka model didapatkan akan semakin baik.

### 3.7.4 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan uji yang berupa langkah pembuktian dugaan peneliti atau hipotesis. Langkah ini untuk menguji kebenaran hipotesis yang dikemukakan peneliti secara linear.

#### 3.7.4.1 Uji T

Menurut Ghozali (2016) Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial pada analisis data penelitian ini menggunakan derajat signifikasi yaitu 0,05. Uji t dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPPS 25 yang disajikan pada tabel Coefficient.

### 3.7.4.2 Uji F

Menurut Ghozali (2016) Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji pengaruh simuktan (Uji F) dikenal dengan uji serentak atau Uji Model atau uji anova. Uji statistik F pada analisis data penelitian ini menggunakan standar kepercayaan 0,05.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN

## 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020. Dari 50 kusioner yang disebar terdapat 48 kuesioner yang diterima kembali, berjumlah 2 yang tidak kembali.

Tabel 4.1
Rincian Tingkat Pengembalian Kuesioner

| No. | Nama Instansi | Jumlah Kuesioner yang Dibagikan | Jumlah Kuesioner yang Dikembalikan | Jumlah Kuesioner yang Diolah | Jumlah Kuesioner yang Tidak Kembali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2. | Dinas Lingkungan Hidup | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 3. | Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata | 10 | 8 | 8 | 2 |
| 4. | Dinas Pendidikan | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 5. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 10 | 10 | 10 | 0 |

Sumber: Data Primer , diolah (2020)

Tabel 4.2
Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kusioner Responden

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Kuesioner yang Disebar | 50 | 100% |
| Kuesioner yang Tidak Kembali | 2 | 4% |
| Kuesioner yang Tidak Memenuhi Syarat | - | 0% |

| | | |
|---|---|---|
| Kusioner yang Dapat Diolah | 48 | 96% |

Sumber: Data Primer , diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 menujukkan bahwa kusioner yang disebar sebanyak 50 buah, tetapi hanya 48 kuesioner yang dapat dijadikan sebagai data penelitian bagi peneliti. Tingkat pengembalian kusioner sebesar 96%, hal ini dikarenakan 2 kuesioner tidak kembali sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data penelitian. Tingkat kuesioner yang tidak kembali sebesar 4%.

### 4.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bogor maka dapat diketahui krakteristik responden dibawah ini:

a. Jenis Kelamin Responden

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Deskripsi Jenis Kelamin Responden

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Pria | 26 | 54% |
| 2. | Wanita | 22 | 46% |
| Jumlah | | 48 | 100% |

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin yang menjadi responden dalam penelitian lebih unggul pria dibandingkan wanita yaitu pria sebanyak 26 responden dengan tingkat presentase (54%), dan wanita terdapat 22 responden dengan tingkat presentase sebesar (46%) dari jumlah keseluruhan responden.

b. Jabatan Responden

Pengelompokkan responden berdasarkan usia dibagi menjadi 4 kelompok dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Deskripsi Jabatan Responden

| No. | Jabatan | Jumlah | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Badan/Dinas/Instansi | - | 0 |
| 2. | Sekretaris | 2 | 4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Kabid/Kabag | 2 | 4% |
| 4. | Kasubid/Kasubag/Kasubdis/Kasie | 12 | 25% |
| 5. | Staf | 32 | 67% |
| Jumlah | | 48 | 100% |

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menujukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki jabatan sebagai staff dengan jumlah responden sebesar 32 orang atau dengan tingkat presentase sebesar (67)%, kemudian jabatan selanjutnya yaitu kasubid sebanyak 12 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (25)%, responden dengan jabatan kabid terdapat 2 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (4)%, dan yang terakhir jabatan sekretaris terdapat 2 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (4)% dari jumlah keseluruhan responden.

c. Tingkat Pendidikan Responden

Aspek pendidikan sangat penting bagi pegawai pemerintah, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pada sisi yang lain, tingkat pendidikan pada masa sekarang ini menjadi salah satu persyaratan utama untuk dapat menduduki jabatan apapun untuk dipromosikan pada jabatan lebih tinggi. Adapun pengelompokan tingkat pendidikan dapat dilihat ditabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Strata 1 (Sarjana) | 24 orang | 50% |
| 2. | Strata 2 (Master) | 13 orang | 27% |
| 3. | Strata 3 (Doktor) | - | 0 |
| 4. | Diploma 3 (D3) | 7 orang | 15% |
| 5. | SLTA/Sederajat | 4 orang | 8% |
| Jumlah | | 48 | 100% |

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menujukkan bahwa rsponden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-1 yaitu sebanyak 24 responden dengan tingkat presentase sebesar (50)%, pendidikan S2 sebanyak 13 responden dengan tingkat presentase sebesar (27)%, pendidikan Diploma sebanyak 7 responden dengan

tingkat presentase sebesar (15)%, pendidikan SLTA sebanyak 4 responden dengan tingkat presentase sebesar (8)%, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan S-3 tidak terdapat dalam penelitian ini.

d. Lama Bekerja

Karakteriristik pegawai yang menjadi responden berdasarkan lama bekerja ditunjukkan dibawah ini:

Tabel 4.6
Deskripsi Lama Bekerja Reponden

| No. | Frekuensi | Jumlah | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1. | 1-5 Tahun | 4 orang | 8% |
| 2. | 6-10 Tahun | 12 orang | 25% |
| 3. | 11-15 Tahun | 21 orang | 44% |
| 4. | 16-20 Tahun | 8 orang | 17% |
| 5. | > 21 Tahun | 3 orang | 6% |
| Jumlah | | 48 Orang | 100 % |

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini sebagian besar responden telah bekerja 11-15 tahun sebanyak 21 orang responden dengan tingkat presentase sebsar (44)%, kemudian lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 12 reponden dengan tingkat prsentase sebesar (25)% , lama bekerja 16-20 tahun terdapat 8 responden dengan tingkat presentase sebesar (17)%, lama bekerja 1-5 tahun sebanyak 4 responden dan yang terakhir lama bekerja lebih dari 21 tahun terdapat 3 reponden dengan tingkat presentase sebesar (6)% dari jumlah keseluruhan responden.

e. Latar Belakang Pendidikan

Karakterisitik latar belakang pendidikan yang menjadi responden ditunjukkan dibawah ini:

Tabel 4.7
Deskripsi Latar Belakang Pendidikan Responden

| No. | Latar Belakang Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1. | Ekonomi | 22 orang | 46% |
| 2. | Hukum | 5 orang | 10% |
| 3. | Teknik | 2 orang | 4% |
| 4. | Sosial | 6 orang | 13% |
| 5. | Lainnya | 13 orang | 27% |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah | 48 orang | 100% |

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini sebagian besar berlatar belakang pendidikan ekonomi sebanyak 22 orang responden dengan tingkat presentase (46)%, kemudian berlatar belakang pendidikan lainnya sebesar 13 orang responden dengan tingkat presentase sebesar (27) %, latar belakang pendidikan sosial 6 orang responden dengan tingkat presentase sebsar (13)%, latar belakang pendidikan hukum 5 orang responden dengan tingat presentase (10)%, dan yang terakhir berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 2 orang responden dengan tingkat presentase (4)% dari jumlah keseluruhan responden.

### 4.1.2. Deskripsi Data Variabel

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2), dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) peneliti menggunakan 5 *skala likert*, yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2), dan variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang terdapat dalam kuesioner, yaitu :

1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Tabel 4.8
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

| No. Pernyataan | Penilaian Responden | | | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | STS | | TS | | N | | S | | SS | | | |
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | Resp | % |
| 1 | 1 | 2.1% | 7 | 14.6% | 19 | 39.6% | 14 | 29.2% | 7 | 14.6% | 48 | 100 |
| 2 | 0 | 0 | 13 | 27.1% | 6 | 12.5% | 20 | 41.7% | 9 | 18.8% | 48 | 100 |
| 3 | 1 | 2.1% | 2 | 4.2% | 16 | 22.2% | 16 | 22.2% | 13 | 27.1% | 48 | 100 |
| 4 | 4 | 8.3% | 7 | 14.6% | 7 | 14.6% | 9 | 18.8% | 21 | 43.8% | 48 | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 16 | 33.3% | 16 | 33.3% | 5 | 10.4% | 11 | 22.9% | 48 | 100 |
| 6 | 1 | 2.1% | 8 | 16.7% | 13 | 27.1% | 15 | 31.3% | 11 | 22.9% | 48 | 100 |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 6.3% | 11 | 22.9% | 27 | 56.3% | 7 | 14.6% | 48 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presentase | 7 | 0,7 | 57 | 5,7 | 88 | 8,8 | 106 | 10,6 | 79 | 7,9 | 48 | 100 |

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 menujukkan bahwa untuk item pertanyaan-pertanyaannya paling banyak menjawab yang masing-masing presentasenya adalah pertanyaan pertama 39.6% menjawab netral bahwa transaksi yang terjadi relevan dan dapat diandalkan, pertanyaan kedua 41.7% menjawab setuju bahwa transaksi telah dicatat sesuai dengan standar (penilaian), pertanyaan ketiga menjawab setara antara netral dan setuju dengan presentase 22.2% bahwa transaksi telah dilaporkan sesuai dengan standar pelaporan (tepat waktu pelaporan), pertanyaan keempat 43.8% menjawab sangat setuju laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan jelas, pertanyaan kelima menjawab setara antara tidak setuju dan netral dengan presentase 33.3% bahwa laporan keuangan memiliki kendala informasi, pertanyaan keenam 31.3% menjawab setuju bahwa laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan pertanyaan ketujuh 56.3% menjawab setuju bahwa laporan keuangan menujukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga indikator siklus akuntansi sektor publik antara lain: analisis bukti transaksi, pencatatan data transaksi, pengikhtisaran dan pealporan sudah mewakili pernyataan-pernyataan dari indikator tersebut.

2. Pengawasan Internal

Tabel 4.9
Pengawasan Internal (X2)

| No. Pernyataan | Penilaian Responden | | | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | STS | | TS | | N | | S | | SS | | | |
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | Resp | % |
| 8 | 0 | 0 | 11 | 22.9% | 18 | 37.5% | 12 | 25% | 7 | 14.6% | 48 | 100 |
| 9 | 0 | 0 | 7 | 14.6% | 8 | 11.1% | 14 | 29.2% | 19 | 39.6% | 48 | 100 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2.1% | 19 | 39.6% | 19 | 39.6% | 9 | 18.8% | 48 | 100 |
| 11 | 4 | 8.3% | 6 | 12.5% | 7 | 14.6% | 13 | 27.1% | 18 | 37.5% | 48 | 100 |
| 12 | 0 | 0 | 9 | 18.8% | 3 | 6.3% | 16 | 33.3% | 20 | 41.7% | 48 | 100 |
| 13 | 5 | 10.4% | 3 | 6.3% | 9 | 18.8% | 18 | 37.5% | 13 | 27.1% | 48 | 100 |
| 14 | 0 | 0 | 8 | 16.7% | 7 | 14.6% | 24 | 50% | 9 | 18.8% | 48 | 100 |
| 15 | 1 | 2.1% | 10 | 20.8% | 11 | 22.9% | 17 | 35.4% | 9 | 18.8% | 48 | 100 |
| 16 | 0 | 0 | 11 | 22.9% | 12 | 25% | 15 | 31.3% | 10 | 20.8% | 48 | 100 |
| Presentase | 10 | 1 | 66 | 6,6 | 94 | 9,4 | 148 | 14,8 | 114 | 11,4 | 48 | 100 |

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan dari tabel 4.9 pernyataan no 8 mengenai pengawasan internal responden sebagian besar menjawab netral dengan jumlah presentase sebsar 37.5% bahwa dalam pengawasan internal dilihat dari tingkat kehadiran kerja yang memadai, kemudian perrtanyaan no 9 sebagian besar responden menanggapi sangat setuju dengan presentase sebesar 39.6% bahwa pengawasan internal mengantisipasi atau mengurangi tunggakan kerja, pertanyaan no 10 menjawab setara antara netral dan setuju dengan presentase 39.6% bahwa pengawasan internal mendorong rencana yang disusun dapat direalisasikan, pertanyaan no 11 kebanyakan responden menjawab 37.5% sangat setuju bahwa pengawasan internal mendorong kedisiplinan aparatur pemerintah, pertanyaan no 12 41.7% menjawab sangat setuju bahwa pengawasan internal mencegah penyalahgunaan wewenang, perntanyaan no 13 37.5% menjawab setuju mengenai terpenuhinya hak-hak pegawai, pertanyaan no 14 menjawab 50% menjawab setuju bahwa berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh pengawasan internal, pertanyaan no 15 menjawab 35.4% menjawab setuju bahwa pengawasan internal mampu meningkatkan pelayanan, dan pertanyaan no 16 menjawab setuju dengan presentase sebesar 31.3% bahwa pengawasan internal mengidentifikasikan kegiatan yang mengandung kelemahan dan memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam. Sehingga indikator pengawasan internal antara lain: organisasi, kebijakan, prosedur dan penganggaran sudah mewakili pernyataan-pernyataan dari indikator tersebut.

3. Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 4.10
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

| No. Pernyataan | Penilaian Responden | | | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | STS | | TS | | N | | S | | SS | | | |
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | Resp | % |
| 1 | 2 | 4.2% | 6 | 12.5% | 3 | 6.3% | 22 | 45.8% | 15 | 31.3% | 48 | 100 |
| 2 | 1 | 2.1% | 5 | 10.4% | 14 | 29.2% | 19 | 39.6% | 9 | 18.8% | 48 | 100 |
| 3 | 2 | 4.2% | 7 | 14.6% | 12 | 25% | 6 | 12.5% | 21 | 43.8% | 48 | 100 |
| 4 | 2 | 4.2% | 9 | 18.8% | 9 | 18.8% | 15 | 31.3% | 13 | 27.1% | 48 | 100 |
| 5 | 1 | 2.1% | 6 | 12.5% | 2 | 4.2% | 20 | 41.7% | 19 | 39.6% | 48 | 100 |
| 6 | 1 | 2.1% | 4 | 8.3% | 6 | 12.5% | 20 | 41.7% | 17 | 35.4% | 48 | 100 |
| 7 | 1 | 2.1% | 9 | 18.8% | 3 | 6.3% | 19 | 39.6% | 16 | 33.3% | 48 | 100 |
| 8 | 3 | 6.3% | 9 | 18.8% | 4 | 8.3% | 18 | 37.5% | 14 | 29.2% | 48 | 100 |
| 9 | 4 | 8.3% | 5 | 10.4% | 5 | 10.4% | 31 | 64.6% | 3 | 6.3% | 48 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 8.3% | 7 | 14.6% | 5 | 10.4% | 11 | 22.9% | 21 | 43.8% | 48 | 100 |
| 11 | 2 | 4.2% | 8 | 16.7% | 14 | 29.2% | 13 | 27.1% | 11 | 22.9% | 48 | 100 |
| Presentase | 23 | 2,3 | 75 | 7,5 | 77 | 7,7 | 194 | 19,4 | 159 | 15,9 | 48 | 100 |

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.10 menujukkan bahwa untuk semua item pertanyaan responden menjawab setuju dengan presentase masing-masing secara berturut-turut yaitu 45.8% responden menjawab setuju bahwa visi dan misi program ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi, 39.6% responden menjawab setuju bahwa kinerja instansi pemerintah harus membuat perencanaan strategis (renstra), 43.8% responden menjawab sangat setuju unuk mengembangkan berbagai indikator kinerja dalam instansi pemerintah, 31.3% responden menjawab setuju bahwa pimpinan harus menujukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil, 41.7% responden menjawab setuju bahwa pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan (accountable) hasil, 41.7% responden menjawab setuju mengenai pimpinan dan staf selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil, 39.6% responden menjawab setuju bahwa pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya, 37.5% responden menjawab setuju bahwa pegawai menerima pengakuan positif dalam pencapaian tujuan staregis organisasi, 64.6% responden menjawab setuju bahwa kinerja instansi pemerintah dapat menghubungkan antara pencapaian kinerja dengan tujuan startegis organisasi, 43.8% menjawab sangat setuju bahwa kurangnya intensif dalam kinerja instansi pemerintah tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi, dan 29.2% menjawab netral bahwa laporan akuntabilitas digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan. Sehingga indikator *value for money* kinerja instansi pemerintah antara lain: ekonomi, efisiensi dan efektivitas sudah mewakili pernyataan-pernyataan dari indikator tersebut.

### 4.1.3 Sejarah Kabupaten Bogor

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap akhlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd Van de Negorij Bogor, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri mulai dibangun pada tahun 1817.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan 'ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan'. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu:

- Kerajaan Taruma Negara, diperintah oleh 12 orang raja. Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669.
- Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 raja. Berkuasa sejak 516 hingga tahun 852.
- Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 raja. Bertahta sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Kawali yang diperintah oleh 6 orang raja berlangsung sejak tahun 1333 hingga 1482.
- Kerajaan Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari Jadi Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972.

Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan Dinasti Sung di Cina dan prasasti yang ditemukan di Tempuran sungai Ciaruteun dengan sungai Cisadane, memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke 5 M di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Prasasti-prasasti lainnya peninggalan Purnawarman adalah prasasti Kebon Kopi di Kecamatan Cibungbulang, Prasasti Jambu di Bukit Koleangkak (Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang), dan prasasti Lebak (di tengah sungai Cidanghiyang, Propinsi Banten).

### 4.1.4 Gambaran Kabupaten Bogor

Wilayah kabupaten bogor memiliki luas ± 2.664 km². Secara geografis terletak diantara 6º18' 6º47'10 LS dan 106º23'45- 107º 13'30 BT dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari daratan yang relative rendah dibagian utara hingga darata tinggi di bagian selatan, daratan rendah, sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter diatas permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir. Daratan bergelombang sekitar 43,6% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl, merupakan
Kategori hulu.
Batas-batas wilayah kabupaten bogor adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten tangerang, kota tangerang selatan, kota depok, kabupaten/kota bekasi;
- Sebalah timur, berbatasan dengan kabupaten karawang, kabupaten cianjur dan kabupaten purwakarta;
- Sebelah selatan, berdasarkan dengan kabupaten sukabumi dan kabupaten cianjur;
- Bagian tengah berbatas dengan kota bogor.

Dari Sektor Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.11
Nama Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

| No. | Nama Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Bogor |
|---|---|
| 1. | Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah |
| 2. | Sekretariat Daerah |
| 3. | Inspektorat |
| 4. | Lembaga Badan terdiri dari 4 Lembaga:<br>1. Badan Perencanaan Pembagunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah<br>2. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan<br>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah<br>5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 5. | Lembaga Dinas terdiri dari 22 Dinas:<br>1. Dinas Lingkungan Hidup<br>2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa<br>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk Brencana<br>5. Dinas Ketahanan Pangan<br>6. Dinas Komunikasi Dan Informatika<br>7. Dinas Pendidikan<br>8. Dinas Kesehatan<br>9. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang<br>10. Dinas Sosial<br>11. Dinas Tenaga Kerja<br>12. Dinas Kependudukan Dan Catatn Sipil<br>13. Dinas Perhubungan<br>14. Dinas Tanaman Pangan, Holtikutura Dan Perkebunan<br>15. Dinas Pemuda Dan Olahraga<br>16. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata<br>17. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan<br>18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah<br>19. Dinas Peternakan Dan Perikanan |

| | |
|---|---|
| | 20. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan<br>21. Dinas Perdaganagn Dan Perindustrian<br>22. Dinas Arsip Dan Perpustakaan |
| 6. | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Dan Perlindungan |
| 7. | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 8. | Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari 4 diantaranya:<br><br>1. RSUD Ciawi<br>2. RSUD Cileungsi<br>3. RSUD Cibinong<br>4. RSUD Leuwiliang |

### 4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Bogor

Visi adalah gambaran masa depan yang hendak dituju, sehingga berfungsi sebagai pengarah perjalanan sedangkan misi adalah jalan pilihan untuk menuju masa depan, sehingga berfungsi sebagai pemfokus dan pemberi makna terhadap kerja. Untuk itu, dapatlah dikatakan bahwa urgensi keterukuran visi dan misi maka akan mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi yang diperintahkan dalam suatu program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun Visi Kabupaten Bogor adalah Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban sedangkan Misi nya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudukan perekonomian daerah yang beradaya saing dan berkelanjutan
3. Mewujudukan pembangunan daerah yang merata, berekadilan, dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kesalehan sosial
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Dengan menyusun visi dan misi, pembangunan daerah diharapkan dapat menyentuh pada kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan melakukan penjaringan aspirasi dari bawah ke atas (bottom up), mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat serta menemukan solusi yang tepat guna menanggulangi permasalahan tersebut.

Pembangunan daerah harus dapat melibatkan segala macam elemen masyarakat, swasta dan pemerintah dengan mengelaborasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah selama periode tertentu, contoh: dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra (Rencana Strategi), Renja (Rencana Kerja), atau dokumen sejenisnya. Dokumen perencanaan inilah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya selama 5 tahun.

Oleh karena itu kepala daerah harus membuat konsep visi dan misi pembangunan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan RPJPD sehingga bisa lebih realistis dan menyentuh pada kebutuhan rakyat di daerah. Manfaat penyusunan program kerja para kandidat yang disesuaikan dengan PRJPD maupun RPJMD akan berdampak pada pembangunan daerah lebih terarah, tertata dan terencana dengan matang.

## 4.2 Analisis Data

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPSS Versi 16). Maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

### 4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data

#### 4.2.1.1 Hasil Uji Validitas

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

| No. | Instrumen Penelitian | Corrected Item-Total Correlation (r hitung) | r Tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernyataan 1 | 0,730 | 0,284 | Valid |
| 2 | Pernyataan 2 | 0,868 | 0,284 | Valid |
| 3 | Pernyataan 3 | 0,632 | 0,284 | Valid |
| 4 | Pernyataan 4 | 0,876 | 0,284 | Valid |
| 5 | Pernyataan 5 | 0,630 | 0,284 | Valid |
| 6 | Pernyataan 6 | 0,818 | 0,284 | Valid |
| 7 | Pernyataan 7 | 0,817 | 0,284 | Valid |

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, hasil pengujian validitas menujukkan bahwa semua item instrumen didalam variabel penerapan akuntansi sektor publik yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena Corrected Item-Total Correlation > $r_{tabel}$ pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Internal (X2)

| No. | Instrumen Penelitian | Corrected Item-Total Correlation | r Tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|

| | | (r hitung) | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernyataan 1 | 0,453 | 0,284 | Valid |
| 2 | Pernyataan 2 | 0,732 | 0,284 | Valid |
| 3 | Pernyataan 3 | 0,361 | 0,284 | Valid |
| 4 | Pernyataan 4 | 0,698 | 0,284 | Valid |
| 5 | Pernyataan 5 | 0,737 | 0,284 | Valid |
| 6 | Pernyataan 6 | 0,531 | 0,284 | Valid |
| 7 | Pernyataan 7 | 0,520 | 0,284 | Valid |
| 8 | Pernyataan 8 | 0,444 | 0,284 | Valid |
| 9 | Pernyataan 9 | 0,411 | 0,284 | Valid |

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, hasil pengujian validitas menujukkan bahwa semua item instrumen didalam variabel pengawasan internal yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena Corrected Item-Total Correlation > $r_{tabel}$ pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

| No. | Intsrumen Penelitian | Corrected Item-Total Correlation (r hitung) | R Tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernyataan 1 | 0,803 | 0,284 | Valid |
| 2 | Pernyataan 2 | 0,732 | 0,284 | Valid |
| 3 | Pernyataan 3 | 0,750 | 0,284 | Valid |
| 4 | Pernyataan 4 | 0,665 | 0,284 | Valid |
| 5 | Pernyataan 5 | 0,877 | 0,284 | Valid |
| 6 | Pernyataan 6 | 0,852 | 0,284 | Valid |
| 7 | Pernyataan 7 | 0,842 | 0,284 | Valid |
| 8 | Pernyataan 8 | 0,861 | 0,284 | Valid |
| 9 | Pernyataan 9 | 0,755 | 0,284 | Valid |
| 10 | Pernyataan 10 | 0,877 | 0,284 | Valid |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pernyataan 11 | 0,696 | 0,284 | Valid |

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas,hasil pengujian validitas menujukkan bahwa semua item instrument didalam variabel Kinerja Instansi Pemerintah yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena Corrected Item-Total Correlation > $r_{tabel}$ pada signifikan 0,05 (5%).

### 4.2.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.15
Hasil Uji realibilitas

| Variabel | *Cronbach's Alpha* | Batas Reabilitas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) | 0.879 | 0.70 | Reliabel |
| Pengawasan Internal (X2) | 0.710 | 0.70 | Reliabel |
| Kinerja Instansi Pemerintah (Y) | 0.93937 | 0.70 | Reliabel |

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menujukkan bahwa *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kusioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, Dan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.16
Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov Test*

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 48 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 7.48510695 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .116 |
| | Positive | .066 |
| | Negative | -.116 |
| Test Statistic | | .116 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .110[c] |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifaksi (Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh yaitu 0.110 melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

### 4.2.2.2 Hasil Uji Multikolineritas

Tabel 4.17

Hasil Uji Multikolineritas

**Coefficients[a]**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | -2.550 | 7.390 | | -.345 | .732 | | |
| X1total | .423 | .210 | .242 | 2.013 | .050 | .857 | 1.166 |
| X2total | 1.002 | .225 | .535 | 4.454 | .000 | .857 | 1.166 |

a. Dependent Variable: Ytotal

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, hasil perhitungan nilai tolerenace tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 dengan nilai *tolerance* masing-masing variabel independen sebesar 0.857. sementara itu hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menujukkan hal serupa yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen sebesar 1.166. sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF tidak ada multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 4.2.2.3 Hasil Uji Heterokedasitas

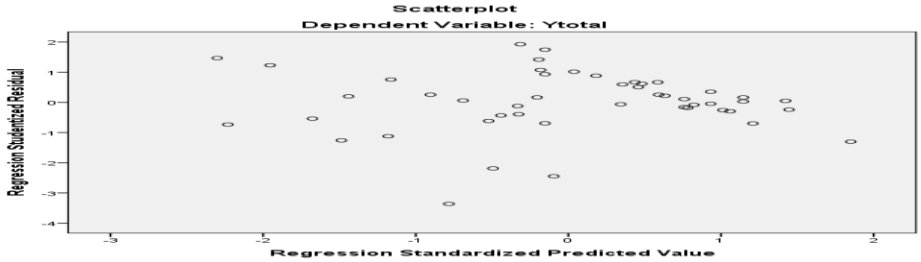

Gambar 4.1 Diagram Scatterplot

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan gambar 4.1 hasil diagram scatterplot diatas, data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heterokedasitas.

### 4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -2.550 | 7.390 | | -.345 | .732 |
| | X1total | .423 | .210 | .242 | 2.013 | .050 |
| | X2total | 1.002 | .225 | .535 | 4.454 | .000 |

a. Dependent Variable: Ytotal

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.18 diatas bila dilihat pada kolom *Unstandardized Cofficients* kolom B, persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = -2{,}550 + 0{,}423\ X1 + 1.002\ X3 + e$$

Dalam persamaan regresi diatas konstanta adalah sebesar -2.550 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1) dan pengawasan internal (X2) yang mempengaruhi, maka kinerja instansi pemerintah yang terjadi pada pemerintah kabupaten bogor sebsar -2.550. sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien penerapan akuntansi sektor publik (X1) sebesar 0,423 berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan penerapan akuntansi sektor publik satu satuan maka variabel kinerja instansi pemerintah naik sebesar 0,423 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
2. Nilai koefisien pengawasan internal (X2) sebesar 1.002 berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pengawasan internal satu satuan maka variabel kinerja instansi pemerintah naik sebesar 1.002 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

### 4.2.3.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .665[a] | .443 | .418 | 7.64963 |

a. Predictors: (Constant), X2total, X1total

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.19 hasil uji koefisien determinasi (R2), menujukkan bahwa nila R square yang diperoleh sebesar 0.443 atau 44,3% hal ini menujukkan bahwa kinerja instansi pemerintah yang ada pada pemerintah kabupaten bogor dipengaruhi oleh variabel Tabel 4.19 penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal sebesar 44,3% dan sisanya 55.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

### 4.2.4 Pengujian Hipotesis

### 4.2.4.1 Pengujian Hipotesis Parsial (uji t)

Tabel 4.20
Hasil Pengujian Parsial (uji t)

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -2.550 | 7.390 | | -.345 | .732 |
| | X1total | .423 | .210 | .242 | 2.013 | .050 |
| | X2total | 1.002 | .225 | .535 | 4.454 | .000 |

a. Dependent Variable: Ytotal

Sumber : Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.20 diatas hasil uji t :

1. Variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai t-hitung sebesar 2.013 dengan taraf signifikan sebesar 0.050 yang lebih besar dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H1 ditolak**, yang dapat dinyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor.

2. Variabel pengawasan internal memiliki nilai t-hitung sebesar 4.454 dengan taraf signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal secara signifikan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H2 diterima,** yang dapat dinyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor.

### 4.2.4.2 Pengujian Hipotesis Parsial (uji f)

Tabel 4.21
Hasil Pengujian Parsial (uji f)

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 2092.718 | 2 | 1046.359 | 17.881 | .000[b] |
| | Residual | 2633.261 | 45 | 58.517 | | |
| | Total | 4725.979 | 47 | | | |

b. Dependent Variable: Ytotal

c. Predictors: (Constant), X2total, X1total

Sumber: Output SPSS 16 Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.21 diatas menujukkan bahwa hasil perhitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 17.881 dengan taraf signifikan sebesar 0.000 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Sehingga jika penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara bersama-sama meningkat maka kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat.

## 4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah, maka dapat dilakukan pembahasan atau analisis antara kesuaian teori dengan praktek yaitu sebagai berikut :

Instansi pemerintah adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melakukan tugas negara sebagai bentuk pelayanan kepada orang banyak. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila mampu mengolah, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi potensi sumber daya manusia pada dasarnya merupakan salah satu modal dan memegang peran yang paling penting dalama mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai dijadikan dasar pedoman bagi yang berkepentingan dalam melaksanakan kedisiplinan untuk mewujudkan pegawai yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggaraan pemerintah yang merupakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik Good Governnce, maka pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai ini antara lain membuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijadikan kepada pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk membina pegawai agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Pengawasan Internal adalah kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### 4.3.1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Uji Parsial yang telah dilakukan antara Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil dari uji regresi linear berganda menujukkan bahwa nilai koefisien variabel X1 sebesar 0.423 artinya variabel X1 berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil pengujian hipotesis nilai t-hitung untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai t-hitung sebesar 2.013 dengan taraf signifikan sebesar 0.050 yang lebih besar dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa **H1 ditolak**, yang dapat dinyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor.

### 4.3.2 Pengawasan Internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Uji Parsial yang telah dilakukan antara Pengawasan Internal (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) . hasil dari uji regresi linear berganda menujukkan bahwa nilai koefisien variabel X2 sebesar 1.002 artinya variabel X1 berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil

pengujian hipotesis nilai t-hitung sebesar 4.454 dengan taraf signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal secara signifikan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H2 diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor.

# BAB V
# SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor). Dengan menggunakan dua variabel yaitu Penerapan akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas dibab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dikarenakan penerapan akuntansi sektor publik belum mampu menunjang akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Akuntabilitas dari masing-masing SKPD masih rendah sehingga akan mempengaruhi kinerjanya. SKPD Kabupaten Bogor belum mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik
2. Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dikarenakan pengawasan internal membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dan mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mecapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sehingga untuk meningkatkan kinerja adalah dengan meningkatkan pengawasan karena dengan pengawasan yang optimal akan berdampak baik pada kinerja instansi pemerintah.
3. Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Adanya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik agar terciptanya *good governance.*

## 5.2 Saran

Beberapa saran yang perlu dikemukakan adalah :

1. Saran bagi Pemerintah Kabupaten Bogor

a. Untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik

Agar ditahun mendatang bisa ditingkatkan pengelolaannya dan lebih efisien lagi sehingga kinerja instansi pemerintah kabupaten bogor lebih baik dalam penerapan akuntansi sektor publiknya.

b. Untuk variabel pengawasan internal

Perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dimasa mendatang dapat terjadi peningkatan kinerja instansi pemerintah kabupaten bogor dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksaan tugas-tugas organisasi.

c. Dalam melaksanankan pencapaian kinerja instansi pemerintah yang baik, pemerintah dapat memaksimalkan pencapaian kinerja dengan tetap mengusahakan pencapaian kinerja 100% sesuai dengan visi dan misi kabuptaen bogor.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

a. Bagi peneliti selanjutnya

Yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, disarankan untuk menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

b. Untuk peneliti selanjutnya

Wilayah penelitian bisa lebih diperluas dalam menentukan objek penelitian, misalnya penelitian dalam satu kantor dinas, badan, atau organisasi lain dibawah instansi pemerintah agar lebih sepesifik hasil dari penelitiannya.

# DAFTAR PUSTAKA


Alamanda, P. (2013). *Pengaruh Pengawasan Intenal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung).* Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.

Anisatul, L., dkk (2017). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi*. ISSN 2460-0784.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008).

Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Biduri, S. (2018). *Buku Ajar Akuntansi sektor Publik. Sidoarjo*: Universitas Mihammadiyah Sidoarjo.

Chomeya, R. (2010). Aggressive Driving Behaviour: Undergraduate Students Study. *Journal of Social Sciences*. 6(3), 411-415.

Dewi, A, P. , dkk. (2015). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik Pada Akuntabilitas Kinerja Skpd. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12.1 2015 50-63, ISSN: 2302-8556.

Dharmawan, T. dan Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4 (1), 2016, 941-948.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro Semarang.

Hadi, M, N. (2016). *Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.

Halim, A. dan Kusufi M, S. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.

Handoko, T, H. (2013). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Haryanto, dkk. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Https://www.radarbogor.id (Diakses pada tanggal 24 November 2019)

Ilmi, A, S. (2014). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Marlena, V. dan Subaeti. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus: BPK, Inspektorat, DPMD Dan DPRD Di Provinsi Bengkulu). *Jurnal Ekonomi Unihaz* -ISSN 2620-8555-Vol.1, No.2.

Mangkunegara, A, P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung*: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Marota, R. dan Ilmiyono, A. (2020). *Sistem Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa*. ISBN: 978-623-6749-30-2, Cetakan pertama, Oktober 2020, Penerbit Ahlimedia Press, Kota Malang.

Mulyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Bogor: In media.

Nugroho, F, A. (2013). *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Se-Ekskarisidenan Surakarta)*. Naskah Publikasi. Universitas *Muhammadiyah Surakarta.*

Nugroho, H. (2016). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nugroho, H, R. (2016). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal ilmiah Ranggagading*, Vol. 12, No. 2.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2007 Nomor 1 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Prawisentono, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

Purnomo, B, S. dan Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparasi, Pengawasan, dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 2018, 467-476.

*Ridwan, W. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bogor)*. Skripsi. Universitas Pakuan Bogor.

Sari, P, W. (2015). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Repository.unikom.ac.id.

Sartika. (2019). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sawyer, D. (2005). *Internal auditing.* Jakarta: Salemba Empat.

Sholikah, R, N., dkk. (2016). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 Edisi Khusus April 2016: 168-175.

Simbolon, M, M. (2013). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia.

Sukmana, W. dan Anggarsari, L. (2009). *Pengaruh Pengawasan Internal Dan Pelaksaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* ISSN: 1907-9958.

Wiratna, S, V. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Wige, P. (2015). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Semarang.

Yahya, Y. (2016). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yuzmalizar. (2014). *Pengaruh Pengawasan Internal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Nurhani Salamah |
| Alamat | : Kp. Cijambe rt02/rw07 Kel. Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Sukabumi, 23 Maret 1998 |
| Umur | : 22 Tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : |

- SD : SDN 1 BANTARGADUNG
- SMP : SMPN 2 BANTARGADUNG
- SMK : SMAN 1 WARUNGKIARA
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, Oktober 2020

Peneliti

(Nurhani Salamah)

# LAMPIRAN

# Lampiran
# Kuesioner Penelitian

**Kepada Yth:**

**Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Responden**

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan dengan judul "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor)", dengan ini kami bermaksud untuk memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sebagai responden dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuisioner ini. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam mengisi kuesioner ini. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk lingkungan hidup kita.

Peneliti,

Nurhani Salamah

**DATA RESPONDEN**

Nama Responden :
Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
Usia saat ini : ☐ 20-30 Tahun

☐ 31-40 Tahun

☐ 41-50 Tahun

☐ ≥ 51 Tahun

Pendidikan Terakhir : ☐ SMU/SMA/SMK ☐ Diploma

☐ Sarjana ☐ PascaSarjana

Nama Dinas/Badan :
Jabatan :
Bidang :
Masa Kerja : ☐ 1-5 Tahun ☐ 6-10 Tahun

☐ 11-15 Tahun ☐ 16-20 Tahun

☐ ≥ 21 Tahun

**Keterangan cara pengisian :**

Berikut ini adalah pernyataan mengenai "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor"

**1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)**

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda centang (√) diantara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1
2. TS : Tidak Setuju Diberi skor 2
3. N : Netral Diberi skor 3
4. S : Setuju Diberi skor 4
5. SS : Sangat Setuju Diberi skor 5

| No. | PERNYATAAN | PENILAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Transaksi yang terjadi relevan dan dapat diandalkan. | | | | | |
| 2 | Transaksi telah dicatat sesuai dengan standar (penilaian). | | | | | |
| 3 | Transaksi telah dilaporkan sesuai dengan standar pelaporan (tepat waktu pelaporan). | | | | | |
| 4 | Laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan jelas. | | | | | |
| 5 | Laporan keuangan memiliki kendala informasi. | | | | | |
| 6 | Laporan keuangan dapat dugunakan dalam pengambilan keputusan. | | | | | |
| 7 | Laporan keuangan menujukkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. | | | | | |

**2. Pengawasan Internal (X2)**

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda centang (√) diantara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1
2. TS : Tidak Setuju Diberi skor 2
3. N : Netral Diberi skor 3
4. S : Setuju Diberi skor 4
5. SS : Sangat Setuju Diberi skor 5

| No. | PERNYATAAN | PENILAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengawasan Internal dilihat dari tingkat kehadiran kerja yang memadai. | | | | | |
| 2 | Pengawasan Internal mengantisipasi atau mengurangi tunggakan kerja. | | | | | |
| 3 | Pengawasan Internal mendorng rencana yang disusun dapat direalisasikan. | | | | | |
| 4 | Pengawasan Internal mendorong kedisiplinan aparatur pemerintah. | | | | | |
| 5 | Pengawasan Internal mencegah penyalahgunaan wewenang. | | | | | |
| 6 | Terpenuhinya hak-hak pegawai. | | | | | |
| 7 | Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. | | | | | |
| 8 | Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. | | | | | |
| 9 | Pengawasan Internal meningkatkan pelayanan. | | | | | |
| 10 | Pengawasan Internal mengidentifikasikan kegiatan yang mengandung kelemahan dan memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam. | | | | | |

**3. Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda centang (√) diantara nomor 1 sampai nomor 5, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. STS : Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1
2. TS : Tidak Setuju Diberi skor 2
3. N : Netral Diberi skor 3
4. S : Setuju Diberi skor 4
5. SS : Sangat Setuju Diberi skor 5

| No. | PERNYATAAN | PENILAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STS | TS | N | S | SS |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Visi dan misi program ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. | | | | | |
| 2 | Membuat perencanaan strategis (renstra). | | | | | |
| 3 | Mengembangkan berbagai indikator kinerja. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil. | | | | | |
| 5. | Pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan (accountable) hasil. | | | | | |
| 6 | Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama- sama dalam mengevaluasi hasil. | | | | | |
| 7 | Pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya. | | | | | |
| 8 | Pegawai menerima pengakuan positif dalam pencapaian tujuan strategis organisasi. | | | | | |
| 9 | Menghubungkan antara pencapaian kinerja dengan tujuan strategis organisasi. | | | | | |
| 10 | Kurangnya intensif tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi. | | | | | |
| 11 | Laporan akuntabilitas digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan. | | | | | |

| No. | Dinas | No. Responden | Jumlah Butir Angket | | | | | | | Skor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X.1.7 | |
| 1. | PUPR | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| | | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 |
| | | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| | | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 |
| | | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| | | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 26 |
| | | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 |
| | | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| | | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| | | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 2. | Lingkungan Hidup | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| | | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| | | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| | | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| | | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| | | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| | | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| | | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| | | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| | | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 3. | Kebudayaan Dan Pariwisata | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| | | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| | | 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 |
| | | 24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 27 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 29 |
| | | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| | | 27 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| | | 28 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| 4. | Pendidikan | 29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 |
| | | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 30 |
| | | 31 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 |
| | | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 25 |
| | | 33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 |
| | | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 28 |
| | | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
| | | 36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 28 |
| | | 37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 33 |
| | | 38 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 |
| 5. | Perdagangan dan Perindustrian | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
| | | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 30 |
| | | 41 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| | | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| | | 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 |
| | | 44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
| | | 45 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 |
| | | 46 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 29 |
| | | 47 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 |
| | | 48 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 29 |

| No. | Dinas | No. Responden | Jumlah Butir Angket | | | | | | | | | Skor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | X2.8 | X2.9 | |
| 1. | PUPR | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| | | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| | | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| | | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| | | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| | | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| | | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| | | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| | | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| | | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 2. | Lingkungan Hidup | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 |
| | | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| | | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| | | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| | | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| | | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| | | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 33 |
| | | 18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 |
| | | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 |
| | | 20 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 |
| 3. | Kebudayaan dan Pariwisata | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 |
| | | 22 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| | | 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 35 |
| | | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 |
| | | 26 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| | | 27 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 33 |
| | | 28 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 35 |
| 4. | Pendidikan | 29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 |
| | | 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 36 |
| | | 31 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 34 |
| | | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 37 |
| | | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| | | 34 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| | | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 34 |
| | | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 |
| | | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 |
| | | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33 |
| 5. | Perdagangan dan Perindustrian | 39 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 36 |
| | | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 38 |
| | | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 |
| | | 42 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| | | 43 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| | | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| | | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 |
| | | 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| | | 47 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |
| | | 48 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 30 |

| No. | Dinas | No. Responden | Jumlah Butir Angket | | | | | | | | | | | Skor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y.1 | Y.2 | Y.3 | Y.4 | Y.5 | Y.6 | Y.7 | Y.8 | Y.9 | Y.10 | Y.11 | |
| 1. | PUPR | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| | | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 35 |
| | | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| | | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 33 |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| | | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 36 |
| | | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| | | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| | | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 2. | Lingkungan Hidup | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| | | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 26 |
| | | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| | | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 |
| | | `15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 37 |
| | | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| | | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 36 |
| | | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 35 |
| | | 19 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| | | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 |
| 3. | Kebudayaan dan Patiwisata | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 43 |
| | | 22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| | | 23 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 49 |
| | | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| | | 25 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| | | 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| | | 28 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| 4. | Pendidikan | 29 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 |
| | | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 45 |
| | | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 |
| | | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 47 |
| | | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 53 |
| | | 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 45 |
| | | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 |
| | | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 |
| | | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 44 |
| | | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 49 |
| 5. | Perdagangan dan Perindustrian | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 |
| | | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 46 |
| | | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 49 |
| | | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 46 |
| | | 43 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 47 |
| | | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 51 |
| | | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 |
| | | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 49 |
| | | 47 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 47 |
| | | 48 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 41 |